

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan nonformal atau yang biasa disebut dengan jalur pendidikan luar sekolah memiliki peranan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang karena faktor usia, waktu (kesempatan) dan sosial ekonomi yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah.

Pendidikan merupakan sektor penting yang berperan aktif dalam meningkatkan pembangunan bangsa. Apabila melihat kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini masih banyak yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan terutama untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah. Mahalnya biaya pendidikan menjadi faktor utama bagi masyarakat sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan bahkan sampai sekolah dasar sekalipun.

Wajib belajar (wajib) 9 tahun sedang diberlakukan di Indonesia, yaitu kewajiban bagi masyarakat untuk minimal mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Tujuan dari wajib 9 tahun ini, adalah untuk meningkatkan mutu manusia Indonesia, agar tidak terpuruk di tengah kehidupan bangsa-bangsa. Karena itu, kurangnya faktor dan kesadaran serta tidak dimilikinya kemampuan bersekolah bagi calon wajib belajar, adalah masalah yang harus segera diatasi, dalam rangka mewujudkan masa depan bangsa melalui pendidikan.

Untuk mengatasi terbatasnya dana tersebut, pemerintah menyelenggarakan Program Kejar Paket A disertakan dengan SD, dan Progran Kejar Paket B yang disertakan dengan SLTP. Secara harafiah, program dapat diartikan sebagai rencana. Seringkali program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu (Arikunto, 1986: 65).

Randahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan mengakibatkan semakin meningkatnya angka kemiskinan dan kebodohan. Tidak jarang masyarakat yang mengalami buta huruf sebagai konsekuensi dari kurangnya pendidikan bagi mereka. Untuk mengurangi masalah tersebut perlu adanya layanan pendidikan yang dapat menyentuh masyarakat hingga lapisan bawah, dimana pendidikan tidak hanya memusatkan pada jalur pendidikan formal saja, melainkan melalui jalur pendidikan lain yaitu pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal atau Pendidikan Luar Sekolah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mungkin terlayani pendidikannya di jalur pendidikan formal. Program yang diselenggarakan dalam Pendidikan Non Formal (PNF) meliputi PAUD, Program Pendidikan Kesetaraan, Program Pemberantasan Buta Huruf melalui Keaksaraan Fungsional, Program Taman Bacaan Masyarakat, Program Pendidikan Perempuan, Program Pendidikan Berkelanjutan, Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui penyelenggaraan program pendidikan nonformal dari, oleh dan untuk masyarakat.

Menurut Umar Faruq (2003: 67), dalam pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, aparat birokrat pusat hanya membuat acuan arah gerak dan tolak ukur keberhasilan, selebihnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat *demand driven*. Hal tersebut ditempuh, karena disadari benar bahwa dengan mematok program berarti mencoba memaksakan kepada masyarakat apa yang mungkin tidak mereka perlukan (*supply driven*). Sehingga program dirancang bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk kepentingan pemerintah dengan dalih untuk menciptakan masyarakat yang gemar belajar. Pendekatan yang hirarkis tidak dapat diterapkan pada Pendidikan Luar Sekolah.

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, secara tegas telah disebutkan bahwa terdapat jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan

pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, melalui kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan di jalur pendidikan nonformal adalah terbentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di tingkat daerah yang dikelola oleh lembaga kemasyarakatan daerah setempat. PKBM merupakan salah satu ujung tombak pengembangan program pendidikan nonformal di tingkat lapangan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dari sinilah diharapkan pengelola PKBM mampu mengembangkan dirinya secara maksimal dalam melayani dan mengembangkan program pemberdayaan di masyarakat (Sihombing, 2007:23).

Dalam pandangan pendidikan nonformal semua orang yang secara potensial merupakan peserta didik dalam berbagai tahap perkembangan hidupnya, karena itu peserta didik yang menjadi sasaran pendidikan luar sekolah sangat luas dan bervariasi. Jalur pendidikan luar sekolah juga mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam rangka mendukung keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Jalur pendidikan luar sekolah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan SMP yang diberi nama Program Paket B (Setiadi, 2007: 26).

Kejar Paket B tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan dan sikap. Untuk mengetahui kendala dan keberhasilan program kejar Paket B di Kecamatan Anggrek khususnya Desa Tolongio, perlu diadakan penelitian. Pendidikan dan kesehatan merupakan komponen-komponen pokok dalam pengertian kebutuhan dasar sehingga harus dimasukkan dalam ekonomi yang utama, di samping sejajar dengan pangan, sandang dan papan.

Program Kejar Paket B adalah salah satu program pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Luar Sekolah. Program ini dikembangkan serta dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang keberadaannya dipertegas pada pasal 18, peraturan Pemerintah N0. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Kelompok belajar Paket B diselenggarakan bagi sekumpulan warga belajar untuk memperoleh pendidikan setara dengan sekolah menengah pertama dan memiliki peran dalam mendukung wajib belajar pendidikan dasar setara SMP (Wajar Dikdas 9 Tahun). Sasarannya adalah siswa lulusan SD/MI sederajat yang tidak melanjutkan ke SMP dan siswa DO SMP usia 13-15 tahun.

Dilihat dari segi kuantitas program dapat memperlihatkan hasil berdasarkan jumlah warga belajar yang mengikuti program belajar di kelompok belajar (Kejar). Sementara hasil belajar secara kualitatif yang berkaitan dengan mutu hasil belajar dan relevansinya dengan tuntutan dunia kerja belum pernah mendapat perhatian yang semestinya. Pendidikan masyarakat belum mampu meyakinkan warga sasarnya tentang arti pentingnya pendidikan sehingga masyarakat belum merasa bahwa pendidikan itu menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupannya. Hal lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah adalah bahwa program pembelajaran masyarakat yang terencana dan terprogram sulit untuk ditelusuri keberadaannya sehingga keberhasilan secara kuantitatif juga sukar untuk dipertanggungjawabkan.

Program pendidikan masyarakat belum menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi berorientasi pada anggaran yang disediakan pemerintah sehingga setelah habis tahun anggaran, habis pula program pembelajarannya. Program dan pelaksanaannya tidak melembaga di masyarakat sehingga sukar mengikuti hasil dan dampak pelaksanaan program, baik terhadap warga belajar maupun lingkungan tempat program dilaksanakan.

Berdasarkan data hasil pengamatan peneliti bahwa jumlah warga belajar Paket B di Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang terdaftar dan mengikuti kegiatan pembelajaran adalah 25 orang yang terbagi dari dua kelompok belajar, masing-masing kelompok mempunyai tutor sebanyak 2 orang. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat penyelenggaraan program paket B, yang pada umumnya sebagian kelompok hanya menggunakan fasilitas di SD setempat.

Keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan Kesetaraan Paket B di Desa Tolongio Kecamatan Anggre Kabupaten Gorontalo Utara sangat bergantung

pada partisipasi dan kontribusi dari masyarakat, pemerintah, dan warga belajar itu sendiri. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat yang menjadi unsur utama dalam keberhasilan program Paket B kurang memperdulikan masalah pendidikan yang ditempuh melalui program tersebut. Masyarakat lebih fokus dan memikirkan masalah-masalah yang sifatnya konsumtif, dan mengabaikan masalah pendidikan, sehingga terkesan kurang mendukung program Pendidikan Kesetaraan Paket B.

Di samping itu, dalam pelaksanaan pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan Paket B banyak mengalami kesulitan, terutama menyangkut banyaknya materi yang dibahas dan kurangnya waktu tatap muka setiap pertemuan, serta banyak materi yang belum dikuasai oleh warga belajar. Akibatnya, warga belajar merasa jenuh dan bosan serta terkesan kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar melalui program Paket B.

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara komprehensif yang diformulasikan dengan judul: **“Studi Penyelenggaraan Program Paket B di PKBM Melati Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan sebelumnya maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana penyelenggaraan program Paket B di PKBM Melati Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui penyelenggaraan program Paket B di PKBM Melati Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan khususnya kepada penyelenggara program Paket B dalam upaya mengefektifkan penyelenggaraan program Paket B.
- b) Mengembangkan potensi untuk penulisan karya ilmiah, khususnya bagi peneliti maupun kalangan akademisi, dalam memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat akan pentingnya Pendidikan Kesetaraan Paket B.

##### **2. Manfaat Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket B di PKBM Melati Desa Tolongio Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam peningkatan pendidikan kesetaraan Paket B, serta dapat mendorong kinerja penyelenggara dalam menyelenggarakan program Paket B secara optimal.